

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut dari hasil penelitian yang dilakukan selama 3 bulan di PT II dan hasil wawancara dari hasil permasalahan SPT masa PPN bulan Maret 2021 adalah:

1. Prosedur perhitungan yang dilakukan pada PT II telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
2. Prosedur pelaporan yang dilakukan pada PT II dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT telah sesuai dengan peraturan perpajakan, karena tidak pernah terlambat dari batas periode yang telah ditetapkan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Pada saat hendak pelaporan SPT PPN bulan Maret terjadinya perbedaan jumlah pajak antara SPT Induk dengan hasil rekapan AP ITA.

5.2 Saran

Berikut beberapa saran bagi PT II yang bisa dijadikan pertimbangan bagi perusahaan:

1. PT II diharapkan untuk dapat berhati – hati dalam melakukan pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar tidak terjadi kesalahan.
2. PT II diharapkan untuk lebih semaksimal mungkin dalam menggunakan sistem *prepopulated* pajak pada aplikasi E-faktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Nurdin & Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendartyo, Muhammad. 2021. “Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tumbuh 0,7 Persen” dalam Kompas 1 April 2021 h.3. Jakarta.
- Mulyono, Djoko. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pajak, Online. 2016. “Pajak Pertambahan Nilai” <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai>) (30 November 2016)
- Pajak, Online. 2018. “Pengelompokan jenis – jenis pajak” <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjasannya> (12 Agustus 2018)
- Pajak, Online. 2020. “Cara Laporan SPT Masa PPN Online E-Faktur” <https://www.online-pajak.com/tips-efiling/cara-lapor-spt-masa-ppn> (10 November 2020)
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.